

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konsep otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah.

Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya, dimana Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom.

Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penggalan PAD sendiri tidak hanya dituntut untuk melihat peluang potensi yang sudah ada namun juga kemampuan suatu daerah dalam membangun potensi yang baru, Sehubungan

dengah hal diatas, maka salah satunya adalah usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil badan usaha milik daerah (BUMD) yang telah berjalan sejak lama. Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. BUMD merupakan salah satu sumber PAD yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan pajak restribusi.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha milik pemerintah daerah yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Penyetaan modal pemerintah daerah dalam BUMD bersumber dari APBD, kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya.

Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. BUMD merupakan salah satu sumber PAD yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan restribusi. BUMD merupakan badan usaha yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah.

Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD juga merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. BUMD juga mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang

bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah.

Saat ini kesan umum tentang keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah tidak efisien, selalu merugi dan membebani anggaran Pemerintah. Lemahnya kinerja BUMD ini seringkali berkaitan dengan pembinaan tenaga profesional yang penuh dengan aroma kepentingan golongan.

Kegiatan perusahaan sudah dapat dipastikan berorientasi pada keuntungan atau laba, Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba sejauh mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan selama periode tertentu.

Seperti halnya di daerah lain, Kota Kupang juga memberikan penyertaan modal terhadap perusahaan-perusahaan daerah/BUMD tersebut. Penyertaan modal pemerintah daerah ini dengan maksud untuk memegang hak kepemilikan. Sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan perusahaan serta memiliki hak untuk memperoleh laba perusahaan sesuai dengan jumlah penyertaan modal.

Berikut adalah data penyertaan modal pemerintah daerah kota Kupang pada badan usaha milik daerah yang ada di kota Kupang.

Tabel 1.1
Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kupang
Tahun Anggaran 2013-2015 (Dalam Rp)

NAMA BUMD	2013	2014	2015
KPN MAJU	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000
PD PASAR	8.849.152.039	8.849.152.039	8.849.152.039
BANK NTT	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Di Kota Kupang terdapat lima BUMD yaitu; Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Sasando, Perusahaan Daerah Pasar, Bank NTT dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju. Namun hanya PD Pasar, Bank NTT dan KPN Maju yang memberikan kontribusi laba terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini di karenakan, yang pertama, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan perusahaan yang melayani kepentingan publik. Maka PDAM tidak menikmati laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang dihasilkan akan digunakan kembali sebagai modal untuk memperluas jaringan instalasi. Yang kedua Perusahaan Daerah Sasando. Sejak tahun 2007 Pemerintah Daerah Kota Kupang tidak memberikan penyertaan modal kepada PD Sasando, karena setiap tahunnya PD Sasando cenderung merugi. Sehingga Pemerintah Daerah membuat kebijakan untuk berhenti memberikan penyertaan modal. Berikut merupakan tabel Target dan Realisasi Laba Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Kupang :

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Laba Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Kupang

Nama BUMD	Tahun Anggaran					
	2013		2014		2015	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
KPN Maju	475.000.000	-	475.000.000	230.400.000	475.000.000	-
PD Pasar	50.000.000	5.000.000	75.000.000	20.000.000	75.000.000	37.500.000
Bank NTT	9.837.152.470	9.837.152.470	12.489.080.361	12.489.080.361	15.628.354.762	15.628.354.762

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Tabel 1.2 terlihat data anggaran dan realisasi laba penyertaan modal pemerintah daerah kota Kupang tahun anggaran 2013-2015. Dan dapat dilihat bahwa Bagian Laba atas Penyertaan Modal pemerintah daerah kota Kupang selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan belum optimalnya kinerja BUMD dalam merealisasikan penerimaan daerah yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi yang sesuai harapan bagi pendapatan asli daerah. Dari tabel diatas juga menunjukkan bahwa kondisi BUMD saat ini sangat memprihatinkan. Namun untuk mengetahui lebih lanjut berapa besar kontribusi laba atas penyertaan modal pemerintah daerah kota Kupang/BUMD terhadap PAD, apa penyebab realisasi kontribusi laba BUMD sangat minim, perbandingan antara besar kontribusi dan penyertaan modalnya, dan apa faktor-faktor yang mendorong pemerintah kota Kupang memberikan penyertaan modal terhadap BUMD, serta apa dampaknya kalau tidak ada kontribusi laba terhadap penyertaan modal pemerintah daerah, maka kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kontribusi Laba Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa besar kontribusi laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Kupang tahun anggaran 2013-2015?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan realisasi laba atas penyertaan modal tidak sesuai dengan target?
3. Faktor-faktor apa yang dapat mendorong penyertaan modal pemerintah daerah kota Kupang pada BUMD?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diambil, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besar kontribusi laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD Kota Kupang tahun anggaran 2013-2015.
2. Untuk mengetahui penyebab realisasi laba atas penyertaan modal tidak sesuai dengan target.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mendorong penyertaan modal pemerintah daerah kota Kupang pada BUMD.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi pemerintah Kota Kupang maupun bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam menilai pengelolaan pendapatan asli daerah dari laba atas penyertaan modal pemerintah daerah dari tahun-tahun sebelumnya dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan pendapatan asli daerah dari laba atas penyertaan modal pemerintah daerah di tahun-tahun yang akan datang.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan pengelolaan pendapatan asli daerah dari laba BUMD.